

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

- Abdul R Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Binsar Gultom, 2012, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2015, Metode Penelitian, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- D.Y. Witanto and A.P. Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana Bandung.
- Elly Erawati & Herlien Budiono, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Gunawan Widjadja, 2013, Hapusnya Perikatan , Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Chandra dan W. Riawan Tjandra, 2001, Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata, Universitas Admajaya Yogyakarta.
- H.R Daeng Naja, 2009, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Handri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hardijan Rusli, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Herian Budiono, 2016, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Ke- satu, Cetakan Ke- 4, PT Citra Aditya Bakti.
- J. Djohansjah, 2008, Reformasi mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Kesaint Blanc, Jakarta.

J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lukman Santosa, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Cakrawala, Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nindyo Pramono, 2020, Hukum Bisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

P.N.H. Simanjuntak, 2017, Hukum Perdata Indonesia, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung.

R Setiawan dalam Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Aditama, Jakarta.

R. Subekti, 2002, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Cet. Ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta.

Salim, 2023, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Depok.

Sirajuddin, 2006, Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik I, pt. Citra aditya bakti, Bandung.

Subekti, 1995, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa Jakarta.

Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke- XXXI, PT Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media Group, Jakarta.

Surwono, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Widodo, 2017, Metode Penelitian Populer Dan Praktis, Raja Grafindo, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1998, Azas-Azas Hukum Perjanjian, P.T. Bale, Bandung.

Zainuddin Ali, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang Undang No. 35 Tahun 1999 Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Amira Khansa Rahmadita dan Akhmad Budi Cahyono, 2023, *Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata Dalam Pengakhiran Perjanjian Karena Wanprestasi*, Lex Patrimonium, Vol. 2, No. 1 [2023], Art. 4.

Arirezky, Indah dan Tamsil, “Analisis Yuridis Terhadap Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Terkait Klausula Pemutusan Sepihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun “The Gianetti”.” Jurnal Novum. Vol. 4. No. 4 (2017).

Asmar, A, 2021, Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara Dalam Pembatalan Sepihak Hak Atas Tanah Yang Dibeberatkan Hak Tanggungan (Analisis Putusan No.43/G/2019/PTUN.PDG dan Putusan No.44/G/2019/PTUN.PLG).UNES Journal Of Swara Justisia, 5(2).

Ega Prabu Liasmanda Sukatendel, 2019, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam memutus Perkara Waris Tanah Pada Masyarakat Hukum Adat Batak Karo Di Pengadilan Negeri Kabanjahe, (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.KBJ), Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Gani, Evy Savitri, 2018, Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik, Jurnal Hukum IAIN Ambon, Vol. XIV, No. 2.

Harry Purwanto, 2009, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1, Februari 2009.

Muhtarom, M, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu landasan Dalam Pembuatan Kontrak, 2014, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Peter Mahmud Marzuki, 2018, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Vol. 33 No. 1 (2018), LIP JPHKI, Surabaya.

Rani Apriani dan Greysia Kurniawati, "*Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba Di Karawang*", Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17, Nomor 1.

D. Website

<http://kbbi.web.id/>, di akses pada tanggal 20 November 2024

Makmur,Erick.“SanksiPelakuWanprestasi.”<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelakuwanprestasi/>, dikunjungi pada tanggal 14 Januari 2024 jam 05:56.WIB